

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1982) Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan:

- a. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus.
- b. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita tersebut harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses agar saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi dapat dilihat. Dengan cara tersebut bisa diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Selanjutnya, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan ini merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun demikian, cara tersebut memiliki kelemahan karena cara

tersebut tidak dapat secara tepat menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai.

Suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh/berkembang apabila terdapat serangkaian peristiwa yang timbul yang bertujuan mewujudkan pendapatan perkapita, dan hal tersebut berlangsung dalam jangka panjang, sehingga apabila terdapat satu waktu dimana peningkatan pendapatan perkapita terhenti, akan tetapi jika sewaktu-waktu selanjutnya tetap terjadi peningkatan, maka akan tetap disebut terdapat pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai:

- a. Peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan penduduk.
- b. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat diiringi oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi yang pada umumnya masih bercorak tradisional

Pendapatan perkapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat bergantung pada pertambahan jumlah penduduk. Suatu Negara yang mengalami kenaikan pendapatan nasional belum bisa dikatakan sebagai negara yang telah mengalami pembangunan ekonomi sebab apabila ternyata kenaikan pendapatan nasional tersebut diikuti oleh kenaikan penduduk yang lebih besar secara proporsional, maka Negara tersebut justru akan mengalami penurunan dalam pendapatan perkapitanya (Prayitno, 1986).

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan produktifitas. Todaro mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, serta mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi seperti sistem hukum, pendidikan, kesehatan, agama, pemerintahan dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, dimana dalam proses ini terdapat bermacam-macam unsur. Agar perkembangan ekonomi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka perlu diketahui bagaimana bekerjanya kekuatan-kekuatan dari faktor-faktor yang menentukan perkembangan ekonomi tersebut. Pembangunan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada sektor perekonomian disamping kenaikan output. Jadi pada umumnya pembangunan selalu disertai pertumbuhan, akan tetapi pertumbuhan belum tentu disertai oleh pembangunan. Namun pada tingkat permulaan, mungkin pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan dan begitu pula sebaliknya (Irawan & M. Suparmoko, 1999). Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu

lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999).

2. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Klasik

Aliran Klasik muncul pada akhir abad ke-18 dipelopori oleh Adam Smith, Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi bergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Spesialisasi dalam proses produksi akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan proses produksi. Disamping itu Smith juga menitik beratkan pada “luas pasar”, pasar haru seluas mungkin agar dapat menampung seluruh hasil produksi, sehingga menarik perdagangan internasional karena hubungan perdagangan internasional dapat menambah luasnya pasar sehingga pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Dampaknya akan mendorong penambahan investasi dan persediaan modal, yang selanjutnya akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan akan berdampak pada meningkatnya kemakmuran (kesejahteraan) penduduk (Adisasmita, 2005).

Semboyan dari aliran klasik adalah “*laisser faire laisser passer*” atau persaingan bebas. Artinya tidak ada campur tangan pemerintah dalam

perdagangan dan perekonomian. Pemikiran dan pandangan tokoh aliran klasik (Jhingan, 1999) adalah sebagai berikut:

- 1) *Kebijaksanaan Pasar Bebas*. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna – pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Yang akan memaksimalkan pendapatan nasional adalah “tangan-tangan tak tampak”.
- 2) *Pemupukan Modal, Kunci Ke Arah Kemajuan*. Semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci kemajuan. Oleh karena itu kaum klasik menekankan betapa pentingnya arti tabungan dalam jumlah besar. Hanya pemilik modal dan pemilik tanah yang mampu menabung. Kaum klasik berasumsi bahwa kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan tingkat kebutuhan minimal.
- 3) *Keuntungan, Rangsangan Bagi Investasi*. Menurut kaum klasik, keuntungan akan merangsang investasi. Artinya semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula akumulasi modal dan investasi.
- 4) *Keuntungan Cenderung Menurun*. Keuntungan tidak selalu naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat. Alasannya adalah, naiknya upah sebagai akibat persaingan antar kaum kapitalis. Sementara upah naik karena naiknya harga barang dan mengakibatkan keuntungan menurun.
- 5) *Keadaan Stationer*. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stationer pada akhir proses pemupukan modal. Ketika keuntungan

mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal.

b. Teori Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan (Boediono, 1992) secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan pertumbuhan Neo-Klasik. Ahli ekonomi Neo-Klasik banyak menyumbangkan pemikiran mengenai teori pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi,
- 2) Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang harmonis dan kumulatif,
- 3) Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap pertumbuhan (perkembangan).

Model pertumbuhan Neo-Klasik memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajaun teknologi dan output yang saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam model Neo-Klasik digunakan suatu fungsi produksi yang lebih umum, yang dapat menampung berbagai kemungkinan substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Bentuk fungsi produksi tersebut adalah:

$$Q = F(K, L) \quad \dots\dots\dots(1)$$

Dengan digunakannya fungsi produksi tersebut terdapat satu konsekuensi yaitu bahwa seluruh faktor yang tersedia baik berupa modal maupun tenaga kerja akan selalu terpakai atau digunakan secara penuh dalam proses produksi. Hal

tersebut disebabkan karena dengan fungsi produksi Neo-Klasik tersebut, berapapun K dan L yang tersedia akan bisa dikombinasikan untuk proses produksi, sehingga tidak ada lagi kemungkinan kelebihan atau kekurangan faktor produksi. Posisi full employment bagi semua faktor produksi akan selalu tercapai pada setiap saat, apabila fungsi produksi Neo-Klasik dipergunakan.

Terdapat empat anggapan yang melandasi model pertumbuhan Neo-Klasik yaitu:

- 1) Tenaga kerja atau penduduk (L), tumbuh dengan laju tertentu
- 2) Adapun fungsi produksi $Q=F(K,L)$ berlaku bagi setiap periode
- 3) Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S=sQ$: bila Q naik maka S juga naik dan begitu pula sebaliknya
- 4) Semua tabungan masyarakat diinvestasikan $S=I=\Delta K$. Dalam model Neo-Klasik tidak dipermasalahkan mengenai keseimbangan S dan I . Proses pertumbuhan Neo-Klasik selalu memenuhi syarat warranted of rate, karena S selalu dianggap sama dengan I .

c. Teori Neo-Keynes

Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar (Jhingan, 1999) memberikan peranan kunci investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki oleh investasi. *Pertama* investasi menciptakan pendapatan yang dapat disebut juga sebagai "dampak permintaan", dan *kedua*, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara

meningkatkan stok modal dapat disebut juga “dampak penawaran”. Oleh karena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan riil dan output akan senantiasa meningkat. Namun demikian, untuk mempertahankan ekuilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan riil maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Jika tidak, perbedaan antara keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas. Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar dari jalur ekuilibrium pertumbuhan mantap.

Dalam teorinya Roy F. Harrod menunjukkan bagaimana pertumbuhan mantap (ekuilibrium) dapat terjadi dalam perekonomian. Pokok perhatian Harrod berkisar pada pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung secara terus-menerus dalam pola keadaan ekuilibrium yang stabil. Model Harrod didasarkan pada tiga macam laju pertumbuhan yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan aktual, dinyatakan dengan G yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modal output. Dalam model ini persamaan dasarnya adalah:

$$GC = S \quad \dots\dots\dots(2)$$

Di mana G merupakan laju pertumbuhan output dalam periode waktu tertentu dan dapat dinyatakan sebagai $\Delta Y/Y$, C adalah tambahan netto terhadap modal

yang didefinisikan sebagai rasio investasi terhadap kenaikan pendapatan yaitu $I/\Delta Y$ dan S adalah kecenderungan menabung rata-rata yaitu S/Y .

- 2) Laju pertumbuhan terjamin, merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian. Persamaan untuk laju pertumbuhan terjamin adalah:

$$G_w Cr = s \quad \dots\dots\dots(3)$$

Dimana G_w merupakan laju pertumbuhan terjamin atau laju pertumbuhan pendapatan dalam kapasitas penuh yang akan sepenuhnya memanfaatkan stok modal yang sedang membengkak sehingga memuaskan para pengusaha atas jumlah investasi yang mereka tanam. Jadi G_w dalam hal ini adalah nilai $\Delta Y/Y$. Cr , atau modal yang dibutuhkan, menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan tersebut yaitu modal-output yang diperlukan. Cr adalah nilai dari $I/\Delta Y$. Sedangkan s adalah persamaan dari S/Y .

- 3) Laju pertumbuhan alamiah, merupakan laju kemajuan di mana pertumbuhan penduduk dan perbaikan teknologi berjalan lambat. Laju ini bergantung pada variabel-variabel makro seperti penduduk, teknologi, sumber daya alam, dan peralatan modal. Dengan kata lain merupakan laju pertumbuhan output dalam pekerjaan penuh yang ditentukan oleh laju pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Persamaan untuk laju pertumbuhan alamiah adalah:

$$G_n.Cr = \text{atau} \neq S \quad \dots\dots\dots(4)$$

Sedangkan gagasan Evsey D. Domar berpangkal tolak pada berlakunya asas investment multiplier. Laju pertumbuhan pada permintaan efektif langsung

dihadapkan kepada pertumbuhan pada kapasitas produksi. Dalam modelnya diungkapkan bahwa pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan penambahan investasi (I) dikalikan multiplier (I/s). Sedangkan pertumbuhan pada kapasitas produksi adalah sama dengan investasi (I) dibagi oleh kapital output rasio (k). Hasilnya pertumbuhan pada permintaan adalah sama dengan pertumbuhan pada kapasitas produksi:

$$\Delta I/I = s/k \quad \dots\dots\dots(5)$$

Laju pertumbuhan yang tercermin pada persamaan di atas oleh domar dianggap sebagai laju pertumbuhan yang kritis (critical rate of growth) yang analog dengan warranted rate of growth dalam model Harrod. Di dalam hal investasi melebihi laju pertumbuhan yang dimaksud, maka penyimpangan tersebut menyebabkan bahwa $\Delta I/I$ (yang sama dengan pertumbuhan permintaan) akan lebih meningkat secara nisbi dibandingkan dengan s/k (pertumbuhan pada kapasitas produksi). Keadaan demikian akan membawa investasi dalam jumlah yang semakin besar (Sumitro, 1992).

3. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses atau tahapan kegiatan pembangunan dalam suatu wilayah tertentu yang perwujudannya melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui kegiatan investasi pembangunan. Sedangkan tujuan pembangunan wilayah adalah membangun sumber daya manusia seutuhnya dengan memanfaatkan sifat keadaan daerah dan lingkungan yang bersangkutan

terutama aspek yang menyangkut sumber daya fisik dan sosial kultural yang hidup di masing-masing wilayah (Anwar, 2005).

Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kualitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, dan pengembangan-pengembangan perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi wilayah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jenis dan peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk membangun daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian wilayah tersebut (Arsyad,1999).

Menurut Sumodiningrat (2002) yang di kutip oleh Rahman Ali (2009) Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industry dan jasa yang dilaksanakan oleh daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah sesuai dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah, meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan,

pembangunan daerah merupakan usaha untuk memperkuat dan mengembangkan pemerintahan daerah agar semakin mantapnya otonomi daerah, dinamis dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah memiliki dua aspek yaitu bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Strategi pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Oleh karena itu, sebelum merumuskan kebijakan perlu diketahui tipe atau jenis wilayah. Dengan mengetahui ciri suatu wilayah, maka dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dilakukan untuk mengembangkan wilayah tersebut. Menurut Karmaji (2010) Pembangunan ekonomi wilayah harus mampu meningkatkan tingkat pendapatan riil, standar pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara umum. Dalam hal ini konsep lingkungan hidup, kelangsungan hidup, dan pemerataan antar wilayah harus diintegrasikan. Pembangunan wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha seharusnya mengikuti beberapa prinsip dasar sebagai berikut.

a. Prinsip berkelanjutan (*principle of sustainability*)

Prinsip ini memiliki arti bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya baik alamiah maupun buatan harus berkesinambungan.

b. Prinsip kesetaraan (*principle of equality*)

Prinsip ini memiliki makna bahwa semua pihak terkait langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan spasial dan pembangunan wilayah

mendapatkan perlindungan dan manfaat yang setara sehingga tidak terjadi diskriminasi dengan alasan apapun.

c. Prinsip efisiensi (*principle of efisiensi*)

Prinsip efisiensi memiliki arti bahwa penggunaan tanah harus efisien. Perencanaan spasial dan pembangunan wilayah seharusnya dapat mendorong pembangunan kawasan perumahan yang terpadu dan mengurangi terbentuknya kawasan kumuh serta mendorong kerjasama dan memberikan efek saling memberi manfaat antar daerah.

d. Prinsip integrasi (*principle of integration*)

Prinsip integrasi memiliki arti bahwa setiap elemen dalam pembangunan wilayah seharusnya dikombinasikan ke dalam satu kesatuan yang harmonis dan mengikuti beberapa kaidah antara lain:

- 1) Proses dan keputusan dalam perencanaan pembangunan wilayah seharusnya dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kebijakan semua institusi pemerintah.
- 2) Keputusan perencanaan pembangunan wilayah seharusnya didasarkan pada ketersediaan layanan dan infrastruktur termasuk infrastruktur transportasi.

4. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar wilayah

Salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan adalah adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana

dan prasarana seperti transportasi, telekomunikasi dan energi antar wilayah, serta pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Menurut Sjafrizal (2012), Terjadinya Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang sering terjadi dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap daerah terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia antara lain:

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam masing-masing pada daerah. perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah tersebut. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang melimpah akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah

dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam sedikit. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah dengan kandungan sumber daya alam yang sedikit hanya dapat memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah tersebut cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Dengan demikian, terlihat bahwa kandungan sumber daya alam dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor utama lainnya yang dapat mendorong ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah apabila terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis tersebut meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demografis ini akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktifitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai tingkat produktifitas kerja yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya akan mendorong pula peningkatan investasi ke daerah tersebut sehingga akan cenderung pula

meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya, bila pada suatu daerah tertentu kondisi demografinya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya tingkat produktifitas kerja masyarakat setempat yang cenderung menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi investor sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut cenderung lebih rendah.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah (transmigrasi) maupun migrasi spontan. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah karena jika mobilitas barang dan jasa kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah.

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Perekonomian pada daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung akan tumbuh pesat dibandingkan dengan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar wilayah

Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investor swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat daerah setempat.

B. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan pembangunan wilayah secara spasial tidak selalu merata, sehingga seringkali ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi masalah serius bagi pemerintah daerah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB per kapita, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain sebagainya.

Studi dan penelitian mengenai ketimpangan pembangunan wilayah telah banyak dilakukan beberapa diantaranya dilakukan oleh Caska dan RM. Riadi dalam penelitiannya tentang pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah di provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, dan Hipotesis Kuznets. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan 2003-2005, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan analisis Indeks Williamson, sedangkan dari hasil analisis

Indeks Entropy Theil menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di provinsi Riau sangatlah kecil yang artinya masih terjadi pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Dan dari hasil tersebut mengakibatkan tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Provinsi Riau yang menyatakan adanya kurva U terbalik.

Studi lain dilakukan oleh Ayu Sawitri Gama dalam penelitiannya tentang disparitas dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar kabupaten/kota di provinsi Bali. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Williamson, Konvergensi Beta dan analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan PDRB Per kapita di Provinsi Bali selama kurun waktu 1993-2006 termasuk dalam kriteria ketimpangan yang cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan adanya kenaikan derajat ketimpangan dari 0,38 pada tahun 1993 menjadi sebesar 0,58 pada tahun 2006. Angka tersebut dinyatakan tinggi karena pada tahun 2006 nilai koefisien dari Indeks Williamson semakin mendekati angka 1.

Sutarno dan Mudrajad Kuncoro melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di kabupaten Banyumas periode 1993-2000. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, dan Trend Korrelasi Pearson. Hasil analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil menunjukkan bahwa selama periode analisis terjadi kecenderungan kenaikan derajat ketimpangan di kabupaten Banyumas, Hal tersebut dibuktikan juga dengan analisis Trend Korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan

entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993–2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.

Selain itu, Fuad Hasan dan Ikhsanudin melakukan penelitian tentang disparitas ekonomi antar kecamatan di kabupaten Bangkalan dengan alat analisis Indeks Williamson, Indeks Entropy Theil, Tipologi Daerah, dan Analisis Skalogram. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kecamatan di kabupaten Bangkalan cukup rendah akan tetapi terjadi kecenderungan kenaikan disparitas setiap tahunnya.

Sedangkan dalam penelitian ini, selain mengetahui perkembangan ekonomi dan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, juga menentukan sektor-sektor unggulan masing-masing wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu cara untuk mengurangi masalah ketimpangan antar wilayah adalah dengan meningkatkan produktifitas sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh suatu wilayah sehingga dapat meningkatkan barang dan jasa yang dapat di ekspor ke luar wilayah yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita masyarakat wilayah tersebut. Untuk mengetahui pergeseran sektor-sektor basis masing-masing wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan alat analisis Location Quotient (LQ) dengan menggunakan data PDRB tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.